

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Syam Kusufi. (2012). Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi. *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Astuti, N. (2015). Pengaruh Keperilkauan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Di Pemerintahan Kota Kediri Jawa Timur. *Jurnal Manajemen*, 6 no 1, 19–29.
- Dessler, G. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (1st ed.). Jakarta: Indeks.
- Dewanti, A. (2015). *Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Di Kabupaten Ngawi*.
- Erlina. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. In *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*.
- Ghozali. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. *Jurnal Ilmiah Universitas Pandanaran*.
<https://doi.org/10.1177/107049659800700202>
- Ghozali, imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). In *Universitas Diponegoro*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.3929/ethz-b-000238666>
- Ivancevich, J. M. (2008). *Perilaku Dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Kayati. (2016). *Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*. Universitas Negeri Semarang.

- Mahendra, F. ryan; (2016). *Pengaruh Dukungan Atasan, Pelatihan, Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Daerah*. Universitas Bengkulu.
- Mangkunegara, A. P. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mathis. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad, F., Warso, M. M., & Haryono, A. T. (2016). PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Karyawan PT. Toys Games Indonesia Semarang). *Journal of Management*.
- Mulyadi. (2016). Sistem Informasi Akuntansi. Edisi ke-empat. In *Salemba Empat*.
- Nordiawan, D. (2004). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins; Stephen, P. (2001). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Prenhallindo.
- Robbins, S. P. (2006). Perilaku Organisasi Jakarta: *Indeks Kelompok Gramedia*.
<https://doi.org/10.1006/jmbi.1999.3279>
- Ruslinda, A. S. Z. (2019). Pengaruh Dukungan Atasan, Pelatihan Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kegunaan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Pada SKPD Di Pemerintahan Kota Banjarmasin. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 12 no2*.

Simanjuntak, P. J. (2005). Manajemen dan Evaluasi Kerja. In *Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta*.

Soleh, Chabib; Rochmansjah, H. (2010). *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Fokus Media.

Solichin, A. N. (2015). *Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah*.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kauntitatif, Kualitatif, R&D. In *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

Triantoro, S. (2004). *Kepemimpinan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Warisno. (2008). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi*. Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Wati, Setya; Henny, Caecilia; Batlajery, S. (2015). Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Konflik Kognitif Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Merauke. *Ilmu Ekonomi & Sosial*, VI No 1, 44–55.

Yulistia, Y., Yanti, N., & Purwasih, I. (2017). ANALISIS FAKTOR KEPERILAKUAN ORGANISASI TERHADAP KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DI BADAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT. *Jurnal Benefita*.

<https://doi.org/10.22216/jbe>

Website

<http://pangeranarti.blogspot.com/2014/11/pengertian-perilaku-organisasi-lengkap.html> Tentang Teori Perilaku Organisasi Menurut Para Ahli. Diakses pada tanggal 10 Mei 2019

https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan#Kecamatan_Berdasarkan_Undang-Undang_Nomor_23_Tahun_2014_Tentang_Pemerintahan_Daerah Tentang Teori Kecamatan. Diakses pada tanggal 11 November 2019

<http://dispendukcapil.surabaya.go.id/tentang-kami/84-visi-dan-misi> Tentang Visi, Misi, dan Motto Kantor Kecamatan. Diakses pada tanggal 11 November 2019

<https://www.tribunnews.com/regional/2017/04/27/kelurahan-kecamatan-dan-puskesmas-di-surabaya-buka-pada-sabtu> Tentang Janji Pelayanan di Kantor Kecamatan. Diakses pada tanggal 11 November 2019

https://surabaya.go.id/uploads/attachments/2017/1/22047/perwali_1830_kecamatan_dan_kelurahan.pdf Tentang Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan. Diakses pada tanggal 11 November 2019

<http://dispendukcapil.surabaya.go.id/tentang-kami/82-struktur-organisasi> Tentang Struktur Organisasi Kantor Kecamatan. Diakses pada tanggal 12 November 2019

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 283 Ayat (2) Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (24) Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 209 Ayat (2) Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (13) Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 Huruf m Tentang Pemerintah Daerah.

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Standar akuntansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.

Peratura Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 232 Tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.